



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KPBU YANG DITAWARKAN PEMERINTAH DI TAHUN 2023

Sony Hendra Permana
Peneliti Muda
sony.hendra@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menawarkan 26 proyek infrastruktur dengan nilai proyek sebesar Rp165,68 triliun di sepanjang tahun 2023 melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)/*Public Private Partnership*. KPBU merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanan untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Keberadaan KPBU merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan dapat mempercepat penyediaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Tentu pelaksanaan proyek dengan skema KPBU akan mengurangi beban pembiayaan dari APBN dan meningkatkan peran swasta.

Dalam penawaran kerja sama tersebut, 10 proyek di antaranya masuk dalam tahap penyiapan dengan total nilai sebesar Rp38,83 triliun dan 16 proyek masuk dalam tahap transaksi dengan nilai Rp126,85 triliun. Adapun proyek KPBU yang masuk tahap penyiapan terbagi atas dua proyek di sektor jalan dan jembatan dengan estimasi jumlah investasi senilai Rp22,87 triliun, dua proyek di sektor SDA dengan estimasi jumlah investasi senilai Rp6,71 triliun, satu proyek di sektor perumahan dengan estimasi jumlah investasi senilai Rp1 triliun, dan lima proyek di sektor permukiman dengan estimasi jumlah investasi senilai Rp3,25 triliun. Sementara itu, proyek KPBU yang masuk dalam tahap transaksi terbagi atas dua proyek di sektor jalan dan jembatan, tujuh proyek di sektor sumber daya air (SDA) dengan estimasi jumlah investasi senilai Rp8,77 triliun, empat proyek di sektor perumahan dengan estimasi jumlah investasi senilai Rp14,81 triliun, dan tiga proyek di sektor permukiman.

Proyek-proyek yang akan ditawarkan tersebut terdiri dari 13 proyek jalan dan jembatan tersebut antara lain jalan pendukung IKN, OM Suramadu, Jalan Akses Exit Toll, Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Jalan Tol Jember-Lumajang, Jalan Tol Jember-Situbondo, Jalan Tol Tulungagung-Kepanjen, Jembatan Pulau Laut-Tanah Bumbu, Jembatan Muna Buton, Jalan Tuban-Babat-Gresik, dan Jalan Tol Kohod-Lebakwangi. Kemudian dari sektor Sumber Daya Air (SDA) ada 6 proyek dalam penyiapan meliputi, Bendungan Merangin di Jambi, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Tiga Dihaji Sumatera Selatan, Revitalisasi dan Modernisasi irigasi sistem interkoneksi *High Level Diversion* (HLD) wilayah Sungai Lombok, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan PLTS Bendungan Rotiklot Nusa Tenggara Timur, PLTMH dan PLTS Bendungan Napun Gete Nusa Tenggara Timur serta daerah irigasi Komering Sumatera Selatan. Pada sektor perumahan, terdapat 2 proyek rumah susun (rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU yakni Rusun Karawang Spuur dan Rusun IKN Tahap I. Pada sektor permukiman, terdapat 5 proyek yang sedang disiapkan meliputi: Pendampingan Penyiapan KPBU tempat pemrosesan

akhir (TPA) sampah Manggar Balikpapan, Pendampingan Penyiapan KPBU sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Jatigede Jawa Barat, SPAM Jatiluhur II Ir. H.Juanda-Jabar dan DKI Jakarta, Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM Ayung terintegrasi dengan saluran pembawa air baku (SPAB) Sidan Bali, dan Pendampingan Penyiapan KPBU SPAM dan SPAB Karian Barat Banten. Khusus proyek infrastruktur di IKN akan difokuskan untuk menarik investor dari dalam negeri.

Salah satu karakteristik utama dalam KPBU adalah terdapat alokasi risiko. Keterlibatan pihak swasta dalam KPBU tidak berarti mengalihkan seluruh risiko kepada pihak swasta. Alokasi risiko yang optimal dalam KPBU yaitu mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelola atau menanggungnya. Mengingat semakin banyaknya proyek pemerintah yang akan menerapkan skema KPBU pada tahun 2023, pemerintah perlu mewaspadaai risiko fiskal yang muncul dari perjanjian KPBU dan perlu menyusun mekanisme pengelolaan risiko yang baik untuk masing-masing proyek.

Atensi DPR

Penawaran proyek infrastruktur dengan skema KPBU di tahun 2023 menjadi perhatian DPR RI, khususnya dalam hal penyiapan, transaksi, sampai dengan pelaksanaan proyek. Komisi V DPR RI harus memastikan bahwa proyek KPBU yang ditawarkan oleh pemerintah dapat menarik minat investor untuk masuk dalam proyek tersebut sehingga proyek dapat terealisasi. Komisi V DPR RI juga perlu mengamati keterlibatan pihak swasta dalam KPBU sehingga diharapkan pemerintah benar-benar memilih badan usaha yang memiliki kompetensi dan komitmen dalam kerja sama pembangunan infrastruktur agar tidak terdapat proyek yang terhambat pembangunannya. Selain itu, dalam pelaksanaan sistem lelang yang ditawarkan harus benar-benar transparan dan sesuai dengan ketentuan agar tidak terdapat penyalahgunaan baik dari aparat maupun pelaku usaha yang terlibat. Kementerian PUPR harus berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI agar memastikan proyek-proyek yang ditawarkan melalui skema KPBU tersebut selaras dengan rencana strategis pembangunan nasional agar tercapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan proyek juga harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dalam pengenaan tarif kepada konsumen agar tidak membebani masyarakat. Komisi V DPR RI juga perlu mengingatkan pemerintah untuk mewaspadaai risiko fiskal yang muncul dari perjanjian KPBU dan meminta pemerintah untuk menyusun mekanisme pengelolaan risiko yang baik untuk masing-masing

Sumber

Bisnis Indonesia, 5 Juli 2022;
kontan.co.id, 7 Juli 2022;
sindonews.com, 4 Juli 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@puslitbkd_official](https://www.instagram.com/puslitbkd_official)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022